

## **Pengaruh Luas pengungkapan Corporate Social Responsibility, Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas, dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak**

Hamida Hasan✉

Afiliasi Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh luas pengungkapan *corporate social responsibility*, karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas, dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitian terdiri dari 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2015-2019. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, karakteristik eksekutif dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan keluarga, profitabilitas dan komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: *corporate social responsibility*, karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas, *corporate governance*, agresivitas pajak.

Copyright (c) 2022 Hamida Hasan

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [0911029001hamida@gmail.com](mailto:0911029001hamida@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan membuat inovasi-inovasi baru. Pada umumnya perusahaan yang berorientasi pada laba memiliki motivasi untuk memaksimalkan laba dan menurunkan biaya serendah-rendahnya. Salah cara mengurangi biaya pada perusahaan tersebut adalah dengan membuat sebuah perencanaan dengan tujuan memperkecil biaya pajak perusahaan atau bila memungkinkan menghilangkan biaya pajak tersebut.

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar adalah pajak. Pajak menjadi andalan bagi negara karena dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur dan lain sebagainya. Besarnya peran pajak didalam penerimaan negara tercermin dalam APBN. Oleh karena itu Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan (Maharani,2014).

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dapat dianggap sebagai beban (*expense*) atau biaya (*cost*) dalam menjalankan usaha. Biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profits*), tingkat pengembalian (*rate of returns*) dan arus kas (Luh, 2012). Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk agresivitas pajak. Dalam upaya efisiensi pajak, banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al.* 2010).

Agresivitas pajak adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui tindakan perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak berdampak langsung terhadap penerimaan negara karena pendapatan yang diperoleh dari pajak akan menjadi berkurang dari jumlah seharusnya (Frank *et al.* (2009)).

Pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak telah dianggap membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, tindakan tersebut secara tidak langsung akan menjadi perhatian publik karena pembayaran pajak perusahaan memiliki peranan penting bagi masyarakat sehingga bisa mengubah pendapat masyarakat terhadap perusahaan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (Lanis dan Richardson (2013)).

Lanis dan Richardson (2012) meneliti tentang pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak yang ada di Australia, dan hasilnya menemukan berhubungan negatif signifikan CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Watson (2011) tentang hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak yang ada di Amerika Serikat dan hasil penelitiannya menemukan adanya hubungan yang signifikan antara CSR terhadap agresivitas pajak.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, sehingga membuat perusahaan tidak serta merta melakukan tindakan pajak agresif, hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer, sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif (Sari dan Martani, 2010).

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Carolina, *et al.* (2014) menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi berpengaruh negatif, yang artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan, itu berarti perusahaan tersebut sudah melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif dalam mengambil risiko untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Selain dari karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga juga mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010) menemukan bahwa tingkat keagresifan tindakan pajak pada perusahaan keluarga lebih kecil dibanding perusahaan non keluarga, hal ini terjadi karena diduga kepemilikan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi, dari pada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Hubungan kepemilikan keluarga dengan tindakan pajak agresif diduga berkaitan dengan masalah *corporate governance* perusahaan. Penerapan *corporate governance* sangat diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan, masalah agensi ini timbul karena adanya asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dengan

manajemen perusahaan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya kasus agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama. Selain itu adanya ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya terkait penelitian agresivitas pajak sehingga menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, untuk melihat konsistensi hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai luas pengungkapan CSR, karakteristik eksekutif, kepemilikan keluarga, profitabilitas, dan *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak, khususnya di Indonesia. Untuk variabel *corporate governance* di proksikan dengan kepemilikan institusional, Ukuran dewan komisaris dan komite audit.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan disekitarnya, serta merupakan bagian dari upaya investasi yang mendukung keberlanjutan dari usaha yang dikembangkan tak terpisahkan dari strategi jangka panjang dengan demikian CSR adalah wujud tanggung jawab dan *feedback* kepada masyarakat atas operasi perusahaan dengan tujuan mendapat respon dan dukungan yang baik dan positif dari masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* merupakan operasi bisnis perusahaan yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial, melainkan juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan yang menyeluruh, melembaga dan berkelanjutan, dalam pelaporan CSR terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial.

Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga komunitas local setempat. Menurut teori legitimasi, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk keberlanjutan usahanya. Untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat maka aktivitas CSR perusahaan yang dilakukan sepanjang tahun pada umumnya akan dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan atau pada website perusahaan.

### **Karakteristik Eksekutif**

Low (2006) membedakan karakteristik eksekutif menjadi dua macam, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Karakter eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang agar supaya perusahaan tumbuh lebih cepat.

### **Kepemilikan Keluarga**

Prakosa (2014), menyatakan bahwa kepemilikan keluarga merupakan perusahaan yang dijalankan oleh keluarga, berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang lebih dulu menjalankannya atau keluarga yang mewariskan perusahaannya kepada generasi yang akan datang. Sebuah bisnis keluarga dikelompokkan sebagai bisnis jika orang-orang yang terlibat dalam bisnis sebagian besar masih terikat dalam garis keluarga, dalam sebuah usaha keluarga, anggota keluarga secara strategis dihubungkan pada kualitas hubungan keluarga, itu juga menggabungkan sebuah rentang situasi mulai dari perusahaan keluarga generasi tunggal suami, istri, anak dan keponakan.

### **Profitabilitas**

Menurut Harahap (2002) profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Sedangkan menurut

Sartono (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

### **Corporate Governance**

*Corporate governance* atau yang dikenal dengan tata keola sebuah perusahaan muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*. *Agency problem* adalah konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Sehingga memerlukan sistem pemantauan serta pengawasan yang dikenal dengan istilah *corporate governance* (Hidayanti 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *hypotheses testing* yaitu menguji hipotesis yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap. Menurut jenis hubungan antar variabel, penelitian ini termasuk penelitian kausal yang akan menjelaskan sebab akibat dari suatu masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel dalam penelitian ini adalah 210 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan menggunakan program SPSS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Statistik Deskriptif*

**Tabel 1. Descriptive Statistics**

	<b>Descriptive Statistics</b>				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	210	2.45	455.20	29.4656	32.11964
CSR	210	.03	.47	.1243	.08102
CR	210	.00	.65	.1439	.11460
FO	210	.00	1.00	.1667	.37357
ROA	210	.00	50.92	11.1340	9.95299
KI	210	1.67	98.18	55.5143	25.76621
UDK	210	20.00	80.00	40.9253	11.60897
KA	210	3.00	5.00	3.1810	.45424
SIZE	210	12.66	30.84	23.5697	5.38482
LEV	210	.01	.71	.0981	.09394

Berdasarkan tabel 1 untuk Agresivitas pajak dimana nilai rata-rata ETR yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 29.4656 yang menunjukkan secara umum bahwa persentase rata total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan sebesar 29.4656. nilai minimum, ETR memiliki persentase 2.45 dan nilai maksimum ETR memiliki persentase sebesar 455,20.

Luas pengungkapan CSR diperoleh dari indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pada Tabel 1 indeks minimum CSR diperoleh sebesar 0,03 dan indeks maksimumnya sebesar 0,47. Rata-rata indeks luas pengungkapan CSR diperoleh sebesar 0,1243. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki indeks yang rendah dalam luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Risiko perusahaan (CR) menggambarkan karakteristik eksekutif tabel 1 menunjukkan nilai minimum risiko perusahaan diperoleh sebesar 0,0 dan nilai maksimumnya 0,65. Rata-rata risiko perusahaan pada perusahaan sampel diperoleh 0,1439 yang menunjukkan bahwa umumnya risiko yang terjadi pada perusahaan sampel cenderung rendah. Semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

kepemilikan keluarga diukur dengan menggunakan variabel dummy. Pada Tabel 1, nilai minimum kepemilikan keluarga (FO) diperoleh sebesar 0,0 dan nilai maksimumnya sebesar 1,0. Rata-rata kepemilikan keluarga pada perusahaan sampel diperoleh sebesar 0,1667. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki kepemilikan keluarga.

Profitabilitas diproksikan dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) Pada Tabel 1, nilai minimum profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan sampel diperoleh sebesar 0,00 dan nilai maksimumnya sebesar 50,92. Rata-rata profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan sampel menunjukkan nilai 11,1340. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan cukup profitabilitas dalam menjalankan bisnisnya.

Kepemilikan institusional merupakan ukuran kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan. Pada Tabel 1, nilai minimum kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan sampel diperoleh sebesar 1,67 dan nilai maksimumnya sebesar 98,18. Rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan sampel menunjukkan nilai sebesar 55,5143. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki ukuran kepemilikan saham yang tinggi.

Variabel ukuran dewan komisaris diproksikan dengan presentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan. Pada Tabel 1, nilai minimum ukuran dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan sampel diperoleh sebesar 20 dan nilai maksimumnya sebesar 80. Rata-rata ukuran dewan komisaris pada perusahaan sampel menunjukkan nilai sebesar 40,9253. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki ukuran dewan komisaris yang tinggi.

Dalam penelitian ini, komite audit diproksikan dari jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Pada Tabel 1, nilai minimum komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sampel diperoleh sebesar 3,00 dan nilai maksimumnya sebesar 5,00. Rata-rata jumlah komite audit pada perusahaan sampel menunjukkan nilai sebesar 3,1810. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki tiga komite audit.

Ukuran perusahaan (*SIZE*) merupakan gambaran dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Pada Tabel 1, rata-rata ukuran perusahaan sampel sebesar 23,5697 yang menunjukkan bahwa perusahaan sampel umumnya berukuran besar. Ukuran terkecil perusahaan sampel sebesar 12,66 dan ukuran terbesar perusahaan sampel sebesar 30,84.

*Leverage* diproksikan dari proporsi total hutang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Pada Tabel 1, rata-rata leverage perusahaan sampel sebesar 0,981 yang menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki proporsi rendah antara total hutang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan sampel. Pada nilai minimum, leverage yang dimiliki oleh perusahaan sampel sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,71.

**Analisis Multivariate**

**Tabel 2 Hasil uji regresi linear berganda**

$$ETR = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 CR + \beta_3 FO + \beta_4 ROA + \beta_5 KI + \beta_6 UDK + \beta_7 KA + \beta_8 SIZE + \beta_9 LEV +$$

	Coefficient	t-statistic	Sig.
Konstanta	3.117	24.724	.000
CSR	-.474	-3.483	.001
CR	-.189	-1.646	.101
FO	.074	2.525	.012
ROA	.022	2.187	.030
KI	-.003	-.182	.856
UDK	-.003	-2.819	.005

KA	.070	2.924	.004
SIZE	.003	1.393	.165
LEV	-.252	-2.209	.028

N = 202

R<sup>2</sup> = 0.174

Adj. R<sup>2</sup> = 0.135

F-Statistic=

4.484\*

Variabel dependen adalah ERT; variabel independen adalah CSR, CR, FO, ROA, KI, UDK, dan KA; dan variabel kontrol adalah SIZE dan LEV.

Pada tabel 2 Koefisien regresi variabel CSR sebesar -0.474 dengan signifikansi sebesar 0.001, dapat disimpulkan bahwa luas pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agrevitas pajak. Koefisien regresi variabel CR sebesar -0.189 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.101, dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap agrevitas pajak. Koefisien regresi variabel FO sebesar 0.074, signifikansi sebesar 0.012, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agrevitas pajak. Koefisien regresi ROA sebesar 0.022, signifikansi sebesar 0.030. dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap agrevitas pajak.

Koefisien regresi variabel KI pada tabel 2 sebesar -0.003, signifikansi sebesar 0.856, sehingga hasilnya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agrevitas pajak. Koefisien regresi variabel UDK sebesar -0.003, signifikansi sebesar 0.005, sehingga hasilnya dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agrevitas pajak. Koefisien regresi variabel KA sebesar 0.070, signifikansi sebesar 0.004, sehingga hasilnya dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agrevitas pajak.

Hasil uji hipotesis H1 menunjukkan bahwa luas pengungkapan CSR menunjukkan hasil negatif yang signifikan pada agrevitas pajak. Hasil tersebut mendukung rumusan hipotesis H1 yang menyatakan bahwa luas pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agrevitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Watson (2011) menyatakan bahwa aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan karena perusahaan yang melakukan luas pengungkapan CSR untuk memenuhi kewajibannya dinilai juga akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sehingga agresivitas pajak seharusnya rendah. Di bawah kerangka teori legitimasi, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memerlukan luas pengungkapan informasi tambahan mengenai CSR untuk memenuhi harapan masyarakat. Menurut Deegan *et al* (2002), teori legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan yang agresif pajak akan cenderung mengungkapkan informasi tambahan terkait dengan kegiatan CSR di berbagai bidang dalam rangka meringankan perhatian publik serta mencari simpati masyarakat.

Hasil uji hipotesis H2 menunjukkan bahwa variabel Karakteristik Eksekutif diproksikan dengan *Corporate Risk* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa karakteristik eksekutif lebih tinggi mengambil resiko dalam hal keputusan perusahaan termasuk tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.* (2010), Budiman dan Setiyono (2012) dan Ajie (2015) menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki karakteristik Eksekutif yang diproksikan dengan risiko perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian secara statistik oleh Carolina *et al* (2014) menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi yang negatif, artinya semakin eksekutif bersifat *risk taker*, maka semakin rendah nilai *cash ETR* perusahaan yang berarti perusahaan melakukan agresivitas pajak yang

tinggi. Hal ini disebabkan karena keberanian eksekutif untuk mengambil risiko dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Hasil uji hipotesis H3 menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan keluarga mendukung teori yang digunakan, yaitu teori keagenan, menyatakan bahwa perusahaan saat ini banyak memisahkan antara kepemilikan dan manajerial. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang negatif terhadap perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martani (2010) yang mengatakan bahwa perusahaan keluarga di Indonesia lebih *High Tax Aggressive* dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

Hasil uji hipotesis H4 menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Yang artinya, semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan maka semakin tinggi juga pajak yang akan dibayarkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa diduga karena tingginya profitabilitas perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal dan akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil uji hipotesis H5 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan Fadhillah (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. kepemilikan oleh investor-investor institusional tidak tentu memberikan kontrol kepada manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini bisa saja karena kepemilikan institusional memberikan kepercayaan pengawan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil uji hipotesis H6 menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka agresivitas pajak akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kuriasih dan sari (2013), Ajie (2015), ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila komisaris independen mengalami peningkatan maka agresivitas pajak menurun. Dewan komisaris independen melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah adanya tindakan agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan.

Hasil uji hipotesis H7 menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan maka meningkatkan kualitas *corporate governance* sehingga akan menurunkan adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini berarti bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik karena ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Ajie (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2011), menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## SIMPULAN

Luas pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Teori legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan cenderung mengungkapkan informasi tambahan terkait dengan kegiatan CSR di berbagai bidang dalam rangka meringankan perhatian publik serta mencari simpati masyarakat. Sedangkan Karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dimana teori agensi dan legitimasi tidak mampu menjelaskan hubungan karakteristik

eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kepemilikan keluarga, profitabilitas dan komite audit cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

## Referensi :

- Ajie, R (2015). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Balakrishnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2012). Does Tax Aggressiveness Reduce Corporate Transparency?. *Social Science Research Network*.
- Budiman J. & Setiyono (2012). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Tax Avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Carolina V., Natalia, & Maria D. (2014). *Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening*. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(3): 409-419.
- Chen S., Chen X. Q., & Shevlin T. (2010). *Are Family firms more tax aggressiveness than non-family firms?*. *Journal of financial economics*, 95: 41-61.
- Deegan, C., Rankin, M., and Tobin, J. 2002. An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997 a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3): 312-343.
- Dyreg, Scott D., Hanlon, Michelle, Maydew E. L. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85: 1163-1189.
- Fadhilah, R. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Tesis Magister Akuntansi. Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). *Tax reporting aggressiveness and is relation to aggressive financial reporting*. *The accounting review*, 84: 467-496.
- Hanafi U. & Harto P. (2014). *Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Diponegoro *Journal Of Accounting*, 3(2): 1-11.
- Kurniasih T. & Sari M.M.R. (2011). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi pada Tax Avoidance*. *Bulletin Studi Ekonomi*, 1 (18): 58-66.
- Lanis R. & Richardson G. (2012). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. *J. Account. Public Policy*, pp.86-108.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory*. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, Vol. 26 No 1, pp.75-100.
- Luh P. (2012). *Kajian Normatif Yuridis Mengenai Peraturan Anti Penghindaran pajak (Anti Avoidance Rule) Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Di Indonesia*.
- Maharani I G.A.C. & Suardana K.A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Ekstektif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2): 525-539.
- Sari dan Martani. 2010. *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Universitas Indonesia.
- Subagiastra, Komang A., & Edy M.A.K. (2016). *Pengaruh Profitabilitas, kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*. *Ejournal Undiksha Vol No. 2*.